



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IR. FITRAH NUR**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**
3. NHK : **818501**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.934.713.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , Rp. 600.000.000
3. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
4. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 158.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/85 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , Rp. 997.313.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 303.000.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 Tahun 2017, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 947.462.693**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.185.175.693**



III. HUTANG

Rp. 140.223.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.044.952.693

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.